

Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 53 Banda Aceh

Liza Fidiawati^{1*)}, Cahaya Purnama Sari², Syahrianda³, Rika Kustina⁴, Cut Fazlil Hanum⁵, Yuthia Fadhilah⁶

Universitas Bina Bangsa Getsempena¹⁴⁵⁶, SLBN Pembina Provinsi Aceh²³

*) Alamat Korespondensi: Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, 23112, Indonesia; E-mail: liza@bbg.ac.id

Article History:

Received: 05/08/2024;
Revised: 08/09/2024;
Accepted: 19/09/2024;
Published: 05/10/2024.

How to cite:

Liza Fidiawati¹, Cahaya Purnama Sari², Syahrianda³, Rika Kustina⁴, Cut Fazlil Hanum⁵, & Yuthia Fadhilah⁶. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 53 Banda Aceh. *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(2), pp. 88–94. DOI: 10.26539/teraputik.823158



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 2024, Liza Fidiawati, Cahaya Purnama Sari, Syahrianda, Rika Kustina, Cut Fazlil Hanum, & Yuthia Fadhilah.

Abstract: *This research aims to find out: (1) the policies that have been implemented at State Elementary School 53 Banda Aceh, (2) the implementation of inclusive education at State Elementary School 53 Banda Aceh. The type of research used is qualitative descriptive research. Research subjects included class teachers at State Elementary School 53 Banda Aceh. The method used in this research is the case study method. Data collection uses observation and interview techniques. The research results show that there are supporting and inhibiting factors in the implementation of inclusive education. Supporting factors include: 1) parental support; 2) the school environment is friendly to children with special needs; 3) facilities & infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors include: 1) low teacher competence in assisting children with special needs; 2) the diverse needs & abilities of children with special needs; 3) children with special needs need extra assistance; 4) takes a long time to identify & assess children with special needs; and 5) low level of understanding of children with special needs resulting in low learning outcomes.*

Keywords: *Implementation, Inclusive, Education*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kebijakan yang telah diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 53 Banda Aceh, dan (2) implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian berupa guru-guru kelas di Sekolah Dasar Negeri 53 Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Faktor pendukung meliputi: 1) dukungan orang tua; 2) lingkungan sekolah yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus; dan 3) ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara itu, faktor penghambat meliputi: 1) rendahnya kompetensi guru dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus; 2) kebutuhan pendampingan ekstra bagi anak berkebutuhan khusus; 3) proses identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus yang memakan waktu lama; serta 4) rendahnya tingkat pemahaman anak berkebutuhan khusus yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan, Inklusif.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. "Setiap warga negara" mencakup semua individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif seperti warga negara lainnya, berdasarkan kesamaan hak. Merujuk pada peraturan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas memiliki tujuh belas hak, termasuk hak atas pendidikan”. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dalam program wajib belajar dua belas tahun (P.R. Indonesia, 2016). Saat ini, banyak sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus, salah satunya adalah SDN 53 Banda Aceh. Sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus disebut sebagai sekolah inklusif. Dengan adanya sekolah inklusif, sekolah luar biasa (SLB) tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif memberi pandangan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa memandang keterbatasan fisik dan mentalnya. Pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai penyelenggaraan sistem pendidikan bagi semua anak, baik yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak pada umumnya tanpa mengelompokkan anak sesuai keterbatasannya (Yunus, Zakso, Priyadi, & Hartoyo, 2023) dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus didalam sekolah reguler. Pada kenyataannya, guru masih belum mampu untuk menangani anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan, masih banyak guru-guru yang masih belum memahami konsep pendidikan inklusif. Selain itu guru-guru dan kepala sekolah juga beranggapan pendidikan inklusif hanya diperuntukan bagi sekolah khusus atau SLB bukan di sekolah reguler (Jalaluddin, 2022). Kebijakan ini menimbulkan banyak protes dari orang tua, yang mengakibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menjadi sasaran candaan dari teman sebayanya. Hal ini diatur dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, yang memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus serta potensi atau bakat istimewa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara normal bersama peserta didik lainnya di semua jenjang sekolah.

Ketentuan ini dipertegas dalam PP No. 13 Tahun 2020 tentang Sanksi Administratif Bagi Pihak yang Melanggar Ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan terkait pendidikan inklusif. Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan luar biasa belum optimal, yang berarti anak-anak dengan kebutuhan khusus masih sering dipisahkan dari anak-anak normal dan ditempatkan di sekolah luar biasa (SLB). Sekolah dasar yang menerapkan pendidikan inklusif menghadapi tantangan tersendiri bagi seluruh elemen di lembaga pendidikan tersebut. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sekitar, mengingat hal ini merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan dimensi pada *Index for Inclusion*, kendala budaya mencakup penolakan terhadap kehadiran dan belajar bersama anak berkebutuhan khusus (Wijaya, 2024). Selain itu, permasalahan lain terkait peran *stakeholder* di bidang pendidikan adalah terbatasnya pelatihan terkait pendidikan inklusif serta rendahnya keterlibatan orang tua dan masyarakat (Gusti, 2021). Kendala kebijakan mencakup keterbatasan pengetahuan pembuat kebijakan tentang pendidikan inklusif serta pembangunan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah (Malau, 2023). Meskipun regulasi telah dengan tegas mengatur pemerataan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengakses pendidikan, kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan, khususnya terhadap anak berkebutuhan khusus, masih sering terjadi (Prasetya, Rahman & Adityawati, 2018). Kendala dalam implementasi termasuk pemahaman yang terbatas terkait kurikulum yang beragam serta kurangnya pengetahuan pendidik dalam menangani anak berkebutuhan khusus (Sukomardojo, 2023).

Penerapan pendidikan inklusif memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak-anak normal di sekolah reguler. Namun, ada banyak tantangan dalam implementasinya, termasuk kekurangan tenaga pendidik khusus (GPK), kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan inklusif, serta kurangnya sosialisasi tentang pendidikan inklusif kepada guru, peserta didik reguler, dan masyarakat. Penerapan pendidikan inklusif di sekolah tidak hanya bermanfaat bagi siswa yang memerlukan dukungan khusus, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan layak bagi semua siswa.

Aspek penting dalam penerapan pendidikan inklusif adalah penyediaan lingkungan belajar yang mendukung berbagai kebutuhan siswa. Ini mencakup aksesibilitas fisik di sekolah,

penggunaan materi pembelajaran yang sesuai, dan dukungan tambahan seperti guru pendidik khusus (GPK) dan layanan dukungan pendidikan. Keterlibatan komunitas sekolah, termasuk guru, tenaga pendukung, orang tua, dan siswa, juga sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Penerapan pendidikan inklusif juga melibatkan penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran untuk memastikan setiap siswa menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kurikulum di sekolah inklusif adalah kurikulum reguler yang disesuaikan dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Menurut Direktorat PLB (Tarmansyah, 2007), modifikasi dapat dilakukan melalui alokasi waktu, isi atau materi, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Ini melibatkan penggunaan berbagai strategi pengajaran dan pendekatan diferensiasi yang memungkinkan setiap siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan penerapan pendidikan inklusif yang efektif, sekolah bukan hanya menjadi tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai kebebasan, keberagaman, dan kesetaraan. Ini memberikan kesempatan bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kemampuannya, untuk berkembang secara holistik dan mencapai potensi maksimalnya. Pendidikan inklusif adalah kebutuhan yang harus dijalankan di Indonesia agar setiap anak mendapatkan pendidikan yang setara. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif diharapkan dapat meningkatkan wawasan mereka dalam belajar sesuai dengan kebutuhan mereka.

SD Negeri 53 Banda Aceh adalah salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Banda Aceh. SD Negeri 53 Banda Aceh menjadi subjek penelitian yang relevan karena merupakan sekolah inklusif. Guru-guru di SD Negeri 53 Banda Aceh umumnya tidak memiliki latar belakang dalam Pendidikan Luar Biasa dan sekolah ini belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK). Pandangan guru sangat penting karena mereka adalah elemen sekolah yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan anak didik, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang lainnya. merujuk pada kajian di atas, penting untuk dikaji mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif serta factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan system pendidikan inklusid di SD Negeri 53 Banda Aceh sebagai salah satu sekolah yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusif dengan memberikan pelayanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan di sekolah reguler.

Metode

Berdasarkan masalah yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, di mana kondisi nyata yang berkaitan dengan suatu objek, fenomena, atau lingkungan sosial dijelaskan dan kemudian diinterpretasikan secara ilmiah dalam laporan naratif (Anggito, & Setiawan, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, di mana peneliti ikut serta sebagai anggota kelompok penelitian (Nurdin & Hartati, 2019). Selain itu, data juga dikumpulkan melalui wawancara dengan satu orang subjek di SDN 53 Kota Banda Aceh.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, reduksi data, di mana peneliti merangkum, memilih informasi penting, fokus pada hal-hal utama, serta mencari tema dan pola. Kedua, penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk presentasi yang disusun dalam kalimat-kalimat penjelas agar memudahkan pemahaman dan keterkaitan antara tujuan penelitian dengan tugas yang dirumuskan. Ketiga, penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 53 Banda Aceh yang berlokasi di JL. Teuku Imum, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wali kelas di SDN 53 Banda Aceh terkait penerapan pendidikan inklusif, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. SDN 53 Banda Aceh merupakan salah satu sekolah yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif di Banda Aceh. Namun, wawancara tersebut mengungkapkan bahwa terdapat keterbatasan dalam proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Saat ini, SDN 53 Banda Aceh hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu, seperti gangguan penglihatan (*low vision*), lambat belajar (*slow learner*), disabilitas sosial, dan disabilitas pendengaran yang menggunakan alat bantu. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya wawasan guru mengenai kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah, karena para guru umumnya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan bukan dari Sekolah Luar Biasa (SLB), sehingga pengetahuan mereka tentang penanganan anak berkebutuhan khusus masih terbatas.

Saat ini, SDN 53 Banda Aceh belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bertugas mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, setiap wali kelas bertanggung jawab atas peserta didik berkebutuhan khusus di kelasnya masing-masing. Terdapat tiga guru di SDN 53 Banda Aceh yang secara rutin mengikuti pelatihan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, salah satunya adalah narasumber dalam penelitian ini. Namun, narasumber menyatakan keraguan apakah ketiga guru tersebut dapat dianggap sebagai Guru Pembimbing Khusus, karena keterbatasan pengetahuan mereka dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Saat ini, terdapat sembilan peserta didik berkebutuhan khusus di SDN 53 Banda Aceh dengan dua kategori, yaitu *low vision* dan lambat belajar (*slow learner*). Tidak ada klasifikasi khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran; mereka ditempatkan secara acak seperti peserta didik lainnya.

Sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusif sangat diperlukan untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai, serta dukungan dari pemerintah setempat sangat penting agar program pendidikan inklusif di sekolah dasar dapat berjalan dengan baik (Muazza et al., 2018). Namun, karena hanya terdapat dua kategori peserta didik berkebutuhan khusus di SDN 53 Banda Aceh, sarana yang tersedia saat ini terbatas, salah satunya adalah media belajar berupa kartu-kartu bermain, seperti flashcard untuk siswa *slow learner*.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi pendidikan inklusif di SDN 53 Banda Aceh antara lain: a) kebijakan sekolah yang mendukung; b) adanya koordinasi antara kepala sekolah, tenaga pendidik, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran, masyarakat umum, dan dinas pendidikan; c) keterlibatan dan dukungan orang tua serta keluarga. Hal ini juga tercermin dalam kegiatan pembelajaran, di mana tidak ada kesenjangan antara anak berkebutuhan khusus dan anak lainnya. Sinergi yang dibangun oleh para guru memberikan keuntungan bagi sekolah, memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan bersikap toleran terhadap teman-teman mereka yang memiliki kebutuhan khusus.



Gambar 1. Elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah Inklusif

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 53 Banda Aceh terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup belum semua guru di SDN 53 mengikuti pelatihan atau *workshop* terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah hanya menunjuk tiga orang guru sebagai perwakilan, dan belum terdapat guru pembimbing khusus untuk peserta didik inklusif. Faktor eksternal meliputi sikap orang tua yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak kepada sekolah, serta kurangnya keterbukaan orang tua mengenai kondisi anak mereka saat pendaftaran. Selain itu, pendidikan inklusif di SDN 53 Banda Aceh belum sepenuhnya terintegrasi dengan kurikulum sekolah, yang menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana juga menjadi salah satu penghambat bagi anak berkebutuhan khusus.

Dalam melaksanakan program pendidikan inklusif, sekolah menggunakan kurikulum nasional yang sama dengan siswa reguler, tetapi melakukan modifikasi sesuai kebutuhan siswa. Tidak ada perbedaan materi ajar untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan siswa reguler; materi yang diajarkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Metode atau strategi pembelajaran juga tidak berbeda, meskipun siswa *slow learner* membutuhkan pendampingan khusus di luar jam belajar. Pengaturan tempat duduk dilakukan untuk siswa dengan *low vision*, yang ditempatkan di dekat papan tulis, dan siswa dengan gangguan pendengaran atau yang sulit fokus, yang ditempatkan dekat meja guru. Proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang sama, dan evaluasi dilakukan melalui pengayaan dan remedial untuk semua siswa, baik berkebutuhan khusus maupun reguler.

Berdasarkan temuan di lapangan, tenaga pendidik menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pendidikan inklusif. Untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, guru harus memiliki kesiapan yang matang. Hidayah, (2018) mendefinisikan kesiapan guru sebagai kompetensi yang dimiliki sehingga siap melaksanakan tugasnya. Di SDN 53 Banda Aceh, meskipun para guru kelas sudah cukup memahami peran mereka di sekolah inklusif, kesiapan mereka dalam menangani anak berkebutuhan khusus masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh kekurangan tenaga guru pembimbing khusus, yang menyulitkan guru dalam memberikan pembelajaran yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusif juga sangat dibutuhkan untuk menunjang fasilitas bagi siswa inklusif. Sekolah harus memperhatikan kebutuhan individual setiap siswa berkebutuhan khusus, yang mungkin memerlukan sarana khusus yang berbeda, tergantung pada jenis dan tingkat kebutuhannya. Di SDN 53 Banda Aceh, fasilitas yang ada dapat diakses dengan mudah oleh semua siswa, termasuk ABK, karena tidak ada siswa yang memiliki masalah fisik yang signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan inklusif di SDN 53 Banda Aceh telah dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya diskriminasi antara siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler. Pendidikan inklusif telah dijalankan semaksimal mungkin. Namun, penelitian juga menemukan bahwa pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dan anak reguler masih disamakan. Penyetaraan ini dianggap kurang tepat, karena anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan yang signifikan dengan teman-teman mereka, sehingga memerlukan materi dan praktik pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seiring dengan itu, Fitriyah, & Bisri (2023) menekankan bahwa pendidikan berkualitas berusaha memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan perbedaan individu siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru kelas untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan khusus anak berkebutuhan khusus.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Guru memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi pendidikan inklusif. Namun, kurangnya kerjasama yang efektif antara berbagai pihak terkait menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak berjalan secara optimal. Selain itu, mplementasi pendidikan inklusif di SD Negeri 53 Banda Aceh masih menghadapi berbagai kendala, kepala sekolah, tenaga pendidik, masyarakat, serta dinas pendidikan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata bagi seluruh peserta didik. Terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Faktor

pendukung meliputi: 1) dukungan dari orang tua; 2) lingkungan sekolah yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus; dan 3) ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara itu, faktor penghambat meliputi: 1) rendahnya kompetensi guru dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus; 2) kebutuhan pendampingan ekstra bagi anak berkebutuhan khusus; 3) waktu yang lama dalam proses identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus; serta 4) rendahnya tingkat pemahaman anak berkebutuhan khusus yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar. Kehadiran Guru Pembimbing Khusus (GPK) sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif untuk memberikan pelayanan optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sarana dan prasarana memiliki peran yang krusial dalam implementasi pendidikan inklusif. Sarana mencakup fasilitas fisik, seperti ruang kelas yang dapat diakses oleh semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, serta area bermain yang aman. Prasarana mencakup dukungan sistemik seperti kebijakan sekolah yang mendukung inklusivitas, pelatihan bagi guru dan staf mengenai pendidikan inklusif, serta dukungan psikologis dan sosial bagi siswa dan orang tua. Penerapan strategi belajar yang bervariasi memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran, penilaian, dan bahan pembelajaran agar lebih relevan dan mudah diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya artikel ini tidak lepas dari peran sejumlah pihak yang berkontribusi. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 53 Banda Aceh atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian, serta kepada Ibu Masyitah, S.Pd., yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber dalam wawancara. Penulis juga menyadari adanya kekurangan dalam artikel ini, sehingga dengan penuh harapan penulis mengundang masukan, kritik, dan saran yang konstruktif. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para peneliti di masa mendatang.

Daftar Rujukan / References

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arriani, F., Agustiyawati, & DKK. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>.
- Fitriyah, F., & Bisri, M. (2023). Pembelajaran Berdiferensiasi Berdasarkan Keragaman Dan Keunikan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 9(2), 67-73.
- Gusti, N. S. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Setting Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(3), 532-544.
- Hidayah, N. (2018). Analisis kesiapan mahasiswa prodi Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah sebagai Calon pendidik profesional. *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 5(1), 117-137.
- Jalaluddin, N. S., & Tahar, M. M. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam kalangan Guru Arus Perdana. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(2), e001280- e001280.
- Malau, M. M. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sma Negeri Di Dki Jakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 70-86.
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

- Prasetya, H., Rahman, M., Adityawati, I. A., & Islamiyah, U. K. (2018). Layanan pembelajaran untuk anak Inklusi: memahami karakteristik dan mendesain pelayanan pembelajaran dengan baik.
- Pratiwi, N. A. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Negeri Serang Pengasih Kulon Progo. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 1014-1020.
- Suandi, M. P., Nurfaeda, P., & Widodasih, W. K. (2023). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Nasional Amanah Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 32433-32445. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/12305/9481/22626>.
- Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume*, 5(2), 205-214.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. , Pub. L. No. Nomor 20 (2003). Diakses tanggal 20 Juli 2024 dari https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU_tahun2003_nomor020.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. , Pub. L. No. Nomor 8 (2016). Diakses tanggal 20 Juli 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26352/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf>
- Wijaya, M. Y. (2024). Studi Literatur: Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah-Sekolah Inklusi di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan*, 4(1), 1-12.
- Yasa, R. B., & Julianto. (2017). Evaluasi Penerapan Pendidikan Inklusi Disekolah Dasar Di Kotamadya Banda Aceh Dan Kabupaten Pidie. *International Journal of Child and Gender Studies*, 120-123.
- Yunus, V., Zakso, A., Priyadi, A. T., & Hartoyo, A. (2023). Pendidikan Inklusif Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 313-327.

Competing interests:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.
